

Moderasi beragama berbasis Pancasila sebagai strategi pencegahan perundungan dikalangan remaja: Dalam lingkup pendidikan di sekolah

Moh Nasikhudin Ali

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nasikhudinali89@gmail.com

Kata Kunci:

Moderasi beragama, Pancasila, perundungan, toleransi, anti-kekerasan

Keywords:

Religious moderation, Pancasila, bullying, tolerance, non-violence

ABSTRAK

Perundungan di kalangan remaja masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada perkembangan psikologis, sosial, dan akademik mereka. Upaya pencegahan dan penanganan membutuhkan pendidikan yang menyeluruh, salah satunya melalui penguatan moderasi beragama berbasis nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi beragama yang menekankan sikap toleransi, penerimaan, dan anti-kekerasan terhadap keberagaman yang sejalan dengan Pancasila sehingga membentuk karakter remaja yang terbuka terhadap perbedaan dan berkeadaban.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pendidikan terkait moderasi beragama, pendidikan karakter, dan fenomena perundungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang selaras dengan sila-sila Pancasila dapat memperkuat empati, sikap saling menghormati, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Melalui penerapan nilai tersebut dalam kurikulum, budaya sekolah, dan kegiatan pembinaan, perilaku perundungan dapat ditekan dan hubungan sosial antarremaja menjadi lebih harmonis. Dengan demikian, moderasi beragama berbasis Pancasila menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, toleran, dan bebas perundungan.

ABSTRACT

Bullying among adolescents remains a serious issue that affects their psychological, social, and academic development. Prevention and intervention efforts require comprehensive education, one of which is through strengthening religious moderation based on the values of Pancasila. This study aims to analyze the role of religious moderation, which emphasizes attitudes of tolerance, non-violence, and acceptance of diversity in line with Pancasila, in shaping adolescents' character to become more open to differences and civilized in behavior. The research method used is a literature review by examining journals, research reports, and educational documents related to religious moderation, character education, and the phenomenon of bullying. The results of the study indicate that instilling religious moderation values aligned with the principles of Pancasila can strengthen empathy, mutual respect, and the ability to resolve conflicts peacefully. Through the implementation of these values in the curriculum, school culture, and guidance programs, bullying behavior can be reduced and social relations among adolescents can become more harmonious. Thus, religious moderation based on Pancasila becomes an effective strategy for creating a safe, tolerant, and bullying-free educational environment.



Pendahuluan

Perundungan merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, baik melalui tindakan fisik maupun nonfisik, yang secara sengaja ditujukan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi korban. Bentuk kekerasan ini dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti ejekan, penghinaan, ancaman, pemukulan, pengucilan sosial, hingga penyebaran rumor atau materi yang merendahkan martabat seseorang melalui media digital. Perundungan tidak hanya terbatas pada usia tertentu, tetapi dapat terjadi pada berbagai kelompok umur, mulai dari anak-anak usia sekolah, remaja, hingga orang dewasa yang berada di lingkungan kerja maupun masyarakat umum. Dalam konteks pendidikan, bullying sering kali menjadi masalah serius karena terjadi pada tahap perkembangan psikologis yang sangat penting, di mana korban masih membentuk identitas diri dan kemampuan bersosialisasi. Dampak dari tindakan tersebut sangatlah luas, mencakup gangguan secara emosional, psikologis, bahkan fisik, yang berpotensi menghambat fungsi keseharian korban, seperti konsentrasi belajar, motivasi akademik, serta kepercayaan diri. Selain itu, perundungan dapat merusak kualitas hubungan sosial korban, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat, karena rasa takut, malu, atau ketidaknyamanan yang muncul dari trauma tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, perundungan dapat berkembang menjadi pola kekerasan berulang yang menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat dan mengancam kesejahteraan psikologis seseorang (Afwadzi dkk., 2025).

Dalam berbagai sumber ilmiah, istilah perundungan sering dipakai bergantian dengan istilah bullying maupun violence, yang pada dasarnya merujuk pada tindakan kekerasan. Meskipun istilahnya berbeda, ketiganya memiliki makna yang serupa, yaitu adanya tindakan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Secara khusus, bullying berasal dari kata bully yang menggambarkan perilaku ancaman atau intimidasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Perilaku ini tidak hanya menyebabkan korban merasa takut, tetapi juga dapat memicu stres dan tekanan psikologis yang berdampak pada kondisi fisik maupun mental. Dengan kata lain, bullying mencakup tindakan fisik maupun verbal yang sengaja dilakukan untuk menyakiti atau mengganggu seseorang yang dianggap lebih lemah atau tidak mampu membela dirinya (Asnawi, 2019).

Kenakalan remaja (juvenile delinquency) merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, aturan, atau hukum yang berlaku di masyarakat, dan dilakukan oleh individu yang berada pada fase remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang kompleks, ketika seseorang tidak lagi dianggap anak-anak tetapi juga belum sepenuhnya menjadi dewasa. Pada fase ini, remaja mengalami perubahan besar pada aspek fisik, emosional, dan mental. Karena itu, pemahaman yang tepat tentang siapa yang disebut remaja sangat penting agar proses bimbingan dan pendidikan dapat berjalan efektif (Fitri, 2024).

Perundungan pada remaja dapat terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan, baik biologis, psikologis, maupun sosial budaya. Secara biologis, beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk bersikap lebih agresif dibandingkan anak lain. Dari sisi psikologis, remaja pelaku agresi biasanya memiliki

kontrol diri yang rendah, kurang terampil dalam bersosialisasi, sulit memahami perasaan orang lain, serta sering salah menafsirkan sinyal sosial. Selain itu, masa pubertas dan pencarian identitas juga berpengaruh; dalam upaya ingin diakui atau terlihat “eksis”, remaja sering membentuk kelompok atau geng, dan sebagian melakukan perundungan sebagai bentuk balas dendam atas penolakan atau kekerasan yang pernah mereka alami. Secara sosiokultural, perundungan juga dapat muncul karena tekanan hidup atau karena remaja meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat dari orang dewasa, sehingga mereka menganggap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah (Tang dkk., 2020).

Seiring dengan meningkatnya kasus perundungan, penelitian-penelitian terbaru menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai untuk mencegah perilaku kekerasan di sekolah. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks Indonesia adalah moderasi beragama berbasis Pancasila. Moderasi beragama menekankan sikap seimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, yang mencakup toleransi, anti-kekerasan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi beragama dalam pendidikan karakter di sekolah diyakini mampu membentuk lingkungan yang aman, terbuka, dan bebas dari kekerasan, sekaligus menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi secara harmonis dengan teman sebaya dari latar belakang berbeda. Untuk mewujudkan sikap keberagaman yang moderat dalam merespons Pancasila, dibutuhkan kesadaran bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara memuat nilai universal yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempersatukan perbedaan di tengah kehidupan yang plural (Amirullah dkk., 2022).

Berdasarkan fenomena, data, dan literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana moderasi beragama berbasis Pancasila dapat dijadikan strategi efektif dalam pencegahan perundungan di sekolah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan model pendidikan karakter yang aman, terbuka, dan mendukung pembentukan generasi muda yang toleran, empatik, dan ber karakter. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan solusi terhadap perundungan, tetapi juga memperkuat hubungan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dalam membentuk lingkungan pendidikan yang harmonis dan berkelanjutan.

Pada konteks inilah, empat indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dapat dijadikan sebagai landasan pola berpikir dalam menerima eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Empat indikator yang dimaksud, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal (Islamy, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait perundungan, kenakalan remaja, moderasi beragama, dan nilai-nilai Pancasila. Sumber yang digunakan meliputi jurnal penelitian, buku, laporan resmi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik yang menjelaskan faktor penyebab perundungan, dampaknya, dan strategi pencegahannya melalui pendekatan nilai.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah bagaimana moderasi beragama yang mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal dapat diterapkan sebagai upaya mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan merangkum temuan-temuan dari berbagai literatur sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai peran moderasi beragama berbasis Pancasila sebagai strategi efektif dalam membangun lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.

Pembahasan

Faktor Penyebab Perundungan Remaja

Berbagai faktor psikologis, sosial, dan lingkungan berperan besar dalam memicu kenakalan remaja. Dari sisi psikologis, beberapa remaja mungkin mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau masalah perilaku yang membuat mereka sulit mengendalikan diri dan mengambil keputusan dengan tepat. Remaja yang belum matang secara emosional juga lebih mudah terpengaruh pada perilaku negatif karena mereka kesulitan menghadapi tekanan, kemarahan, atau rasa frustrasi.

1. Dari aspek sosial, teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jika remaja berada dalam lingkungan pergaulan yang menganggap perilaku menyimpang sebagai hal wajar, mereka cenderung ikut terbawa. Kondisi keluarga pun berpengaruh kurangnya komunikasi, adanya konflik, atau minimnya pengawasan dari orang tua dapat meningkatkan risiko remaja melakukan tindakan kenakalan karena mereka tidak mendapat dukungan emosional maupun bimbingan yang cukup.
2. Faktor lingkungan juga tidak kalah penting. Akses yang mudah terhadap alkohol dan narkoba membuat remaja lebih rentan terlibat penyalahgunaan zat. Selain itu, tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi dapat membentuk persepsi bahwa melanggar aturan adalah sesuatu yang biasa. Remaja yang belum memiliki keterampilan sosial yang baik pun kerap kesulitan menjalin hubungan atau menyelesaikan masalah dengan cara sehat, sehingga mereka mungkin memilih perilaku kenakalan untuk mengekspresikan diri atau mengatasi konflik.
3. Pengaruh media dan teknologi juga turut memberi dampak. Paparan konten negatif atau tidak mendidik dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku remaja. Semua faktor ini saling berkaitan, sehingga diperlukan pendekatan

yang menyeluruh melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani kenakalan remaja secara efektif.

Dampak Psikologis dan Sosial

Kenakalan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak yang memengaruhi kondisi psikologis maupun kehidupan sosial mereka. Dari sisi psikologis, remaja yang terlibat dalam perilaku negatif sering mengalami stres dan tekanan mental yang tinggi. Hal ini dapat memicu munculnya gangguan seperti depresi, kecemasan, atau masalah perilaku. Selain itu, mereka cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri karena merasa rendah diri dan memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri (Tamamiyah, 2024). Kenakalan juga dapat menimbulkan perubahan emosi yang drastis, seperti mudah marah, frustrasi, dan kesulitan mengendalikan perasaan. Tidak jarang, remaja akhirnya menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami isolasi karena sulit menjalin hubungan yang sehat dengan teman maupun keluarga. Dampak bullying pada sisi emosi membuat korban sering mengalami perubahan suasana hati yang sulit ditebak. Mereka bisa menjadi lebih sensitif, cemas, takut berlebihan, dan gelisah. Korban juga merasa tidak aman, membutuhkan pendampingan saat pergi ke tempat di mana sebelumnya mereka dibuli. Selain itu, mereka bisa menjadi murung, sedih, mudah menangis, dan sering menyalahkan diri sendiri. Semua ini membuat kondisi emosional korban menjadi tidak stabil dan rentan (Lestari & Muhammad Saiful Kowi, 2024).

Dari sisi sosial, remaja yang terlibat dalam kenakalan sering kali mendapat stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai anak bermasalah, sehingga hubungan sosialnya terganggu. Perilaku negatif ini juga dapat memengaruhi teman sebaya, baik dengan mendorong mereka ikut terlibat dalam tindakan serupa maupun membuat remaja tersebut dijauhi dari kelompok positif. Kenakalan remaja juga dapat membuka jalan menuju tindakan kriminal yang lebih serius di masa depan, yang berdampak pada catatan hukum dan masa depan mereka. Selain itu, perilaku kenakalan sering mengganggu pendidikan, menyebabkan sering bolos, penurunan prestasi, bahkan putus sekolah. Dampak sosial ini juga dirasakan oleh keluarga, yang dapat mengalami tekanan emosional, konflik, dan kebingungan dalam menangani perilaku remaja (Bobyanti, 2023).

Upaya Pencegahan Perundungan

Mencegah perundungan di sekolah tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan hukuman bagi pelaku, karena pendekatan seperti itu sering kali tidak menyentuh akar permasalahan. Sekolah perlu membangun karakter dan nilai moral pada diri peserta didik agar mereka memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui moderasi beragama berbasis Pancasila. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Di lingkungan sekolah, pendidikan moderasi beragama dirancang untuk menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, serta kemampuan memahami perbedaan keyakinan sejak usia dini. Nilai-nilai ini semakin penting ketika siswa memasuki masa remaja, yakni periode ketika mereka mulai

mencari identitas, memperluas pergaulan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang semakin beragam (Aluf dkk., 2024).

Dalam konteks ini, moderasi beragama berjalan seiring dengan prinsip multikulturalisme, Kamaruddin Amin menegaskan bahwa dunia pendidikan perlu dibangun dengan memasukkan nilai toleransi dan semangat multikulturalisme di dalamnya. Multikulturalisme sendiri merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis, tetapi juga menghargai serta mendorong setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menumbuhkan sikap saling menghormati antar perbedaan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang terbuka, inklusif, dan mampu berinteraksi secara sehat di tengah masyarakat yang majemuk (Rohman & Hum, t.t.).

Penelitian Suryadi dan Hasanah (2025) menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam dapat menjadi media penting untuk membentuk perilaku damai pada siswa. Melalui pembelajaran tentang akhlak, kasih sayang, dan sikap menghormati orang lain, siswa dibimbing untuk memahami bahwa mengejek, merendahkan, atau menyakiti teman sebaya adalah perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Pembiasaan materi tentang empati dan kepedulian ini membuat siswa lebih peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini sangat sejalan dengan sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi tanpa kekerasan.

Selanjutnya penelitian oleh Rahayu dan Mulyono (2024) melalui program “Menjadi Asik Tanpa Mengusik”. Program ini bertujuan membantu siswa memahami pentingnya bersikap moderat dan tidak menyakiti orang lain. Selama pelaksanaan program, siswa dilatih untuk menerima perbedaan, mengontrol amarah, dan berkomunikasi dengan cara yang sopan. Hasilnya, siswa yang mengikuti kegiatan ini terlihat lebih mampu bekerja sama dan menunjukkan empati kepada teman sebayanya. Program ini juga memperkuat sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, karena membantu siswa membangun hubungan yang lebih rukun dan harmonis.

Melalui berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan moderasi beragama berbasis Pancasila bukan hanya sebuah konsep, tetapi benar-benar dapat memengaruhi perilaku siswa secara nyata. Ketika nilai toleransi, kemanusiaan, dialog, dan keadilan terus ditanamkan di sekolah, siswa menjadi lebih sadar untuk menjaga hubungan baik dengan teman sebaya dan menghindari tindakan perundungan. Jika sekolah, guru, dan siswa bekerja sama membangun budaya moderat dan berakhlak mulia, maka lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan dapat terwujud. Hal ini tentu sangat penting untuk mendukung perkembangan emosional, sosial, dan akademik peserta didik secara optimal.

Pancasila sebagai Moderasi Beragama

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilainya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi landasan moral bagi seluruh

masyarakat (Unggul dkk., 2022). Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan sikap beragama yang mencerminkan keseimbangan dan kedewasaan. Oleh karena itu, konsep moderasi beragama menjadi penting untuk dibahas. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang tidak berlebihan dan tidak kekurangan baik dalam berpikir, bertindak, maupun berperilaku. Sikap moderat ini membantu seseorang terhindar dari ekstremisme dan mendorong terciptanya perilaku yang bijak, adil, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Hasan, 2021). Pada bagian pembahasan ini, dijelaskan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Penjelasan adalah sebagai berikut.

1. Sila Pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang memegang nilai-nilai agama dan bukan negara yang memisahkan kehidupan dari ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena adanya keberagaman tersebut, sangat penting bagi seluruh warga negara untuk menerapkan nilai toleransi dan saling menghormati antarpemeluk agama.
2. Sila Kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menekankan pentingnya sikap manusiawi dalam kehidupan bersama. Sila ini mengajarkan bahwa setiap orang harus menghormati hak dan martabat sesama, membantu satu sama lain, serta bersikap sopan dan beradab dalam hubungan sosial.
3. Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia”, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus selalu menjaga persatuan dan rasa kebangsaan. Semangat persatuan ini menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara.
4. Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, mengajarkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bersifat demokratis, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat. Karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai masalah.
5. Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan. Keadilan ini diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan perlindungan dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun mental.

Indikator-Indikator Moderasi Beragama

Indikator-indikator ini membantu menggambarkan bagaimana nilai-nilai moderasi diterapkan secara konkret, baik dalam sikap individu maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dengan memahami setiap indikator, kita dapat melihat bagaimana moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan cara seseorang menjalankan keyakinannya, tetapi juga bagaimana ia bersikap terhadap negara, budaya, serta keberagaman yang ada di sekelilingnya. Penjelasan berikut

menguraikan empat indikator utama moderasi beragama yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan beragama yang seimbang, terbuka, dan harmonis.

Indikator pertama dalam moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Sikap ini berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk memegang teguh nilai-nilai dasar yang telah disepakati bersama sebagai bangsa Indonesia. Komitmen ini mencakup pengakuan bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa, serta bahwa seluruh aturan bernegara harus diikuti sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama secara moderat. Orang yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat akan memandang bahwa menjalankan ajaran agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara. Sikap ini penting karena membantu masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan, menghindari benturan ideologi, dan menjadikan agama sebagai kekuatan yang menyejukkan dalam kehidupan sosial.

Indikator kedua adalah toleransi, yaitu kemampuan untuk menerima dan menghormati keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi tidak hanya berarti membiarkan perbedaan, tetapi juga aktif menunjukkan sikap menghargai terhadap keyakinan, pandangan, dan kebiasaan orang lain. Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan sosial sangat membutuhkan sikap ini untuk menjaga keharmonisan. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan efektif bila masyarakat memiliki sikap toleran, karena perbedaan adalah hal yang wajar dalam kehidupan bersama. Sikap toleransi dalam moderasi beragama mencakup dua aspek: toleransi antaragama dan toleransi di dalam internal agama itu sendiri. Toleransi antaragama berarti mampu hidup rukun dengan pemeluk agama lain, sedangkan toleransi internal agama berarti seseorang mampu menghargai kelompok-kelompok kecil yang memiliki penafsiran berbeda dalam satu agama. Dengan dua bentuk toleransi ini, masyarakat dapat lebih terbuka dalam berdialog dan bekerja sama meskipun memiliki latar belakang yang berbeda.

Indikator ketiga adalah anti-radikalisme, yaitu sikap menolak segala bentuk pemahaman ekstrem yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme dipahami sebagai upaya mengganti sistem sosial atau politik yang berlaku di Indonesia dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, biasanya atas nama agama. Kelompok radikal cenderung menginginkan perubahan instan tanpa mempertimbangkan norma yang ada serta tidak segan melakukan tindakan merugikan orang lain. Moderasi beragama melihat bahwa melaksanakan ajaran agama harus sejalan dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena itu, anti-radikalisme bukan hanya menolak kekerasan fisik, tetapi juga menolak penyebaran ide, sikap, dan tindakan ekstrem yang dapat mengancam persatuan bangsa. Anti-radikalisme juga penting karena tindakan radikal dapat muncul pada pemeluk agama apa pun, bukan hanya pada satu kelompok tertentu. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih waspada dan mampu menjaga ruang publik agar tetap aman dari nilai-nilai yang merusak kehidupan bersama.

Indikator keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Sikap ini menekankan bahwa seseorang yang beragama secara moderat perlu mampu menerima dan menghargai keberagaman tradisi serta kearifan lokal yang hidup di berbagai daerah di Indonesia, selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.

Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya memperkaya kebudayaan bangsa, tetapi juga menjadi aset penting dalam membangun harmoni sosial. Namun, jika tidak disikapi dengan bijak, perbedaan budaya dapat memicu konflik, baik antaragama maupun antarsuku (Prasojo & Pabbajah, 2020).

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal juga membantu seseorang untuk bersikap lebih terbuka dalam menerima tradisi yang berbeda dari yang dianutnya. Orang yang moderat akan memilih untuk memahami konteks budaya tersebut dan tetap menghargainya selama tidak melanggar nilai dasar agama. Dengan cara ini, moderasi beragama membantu menciptakan kehidupan yang damai di tengah kemajemukan budaya dan agama (Junaedi, 2019).

Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual. Maksudnya, moderasi beragama di Indonesia bukan berarti Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara kita memahami dan menjalankan ajaran agama yang perlu bersikap moderat. Indonesia memiliki keragaman kultur, budaya, suku, dan adat-istiadat yang sangat luas. Karena itu, cara beragama yang moderat dibutuhkan agar ajaran agama dapat dipraktikkan secara bijaksana, menghargai perbedaan, dan tetap selaras dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Moderasi beragama bukan mengurangi ajaran agama, tetapi menempatkan ajaran itu secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem, sehingga kehidupan bersama tetap harmonis (Fahri & Zainuri, 2019).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa perundungan di kalangan remaja masih menjadi persoalan yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Tindakan perundungan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akibat dari rangkaian faktor yang saling berhubungan. Faktor tersebut mencakup kondisi emosional remaja yang sedang berada pada masa pencarian jati diri, pengaruh kuat dari lingkungan pergaulan, pola asuh orang tua yang kurang mendukung perkembangan sosial anak, hingga paparan media sosial yang sering kali memuat konten negatif dan tidak terkontrol. Semua faktor ini, secara langsung maupun tidak, dapat memicu munculnya perilaku agresif. Dampaknya pun tidak ringan; perundungan dapat mengganggu kesehatan mental remaja, merusak relasi sosial mereka, dan bahkan menghambat proses belajar serta prestasi akademik di sekolah.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa moderasi beragama yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai strategi yang efektif untuk menekan dan mencegah perilaku perundungan. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, menghindari sikap berlebihan, serta menolak segala bentuk kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Prinsip-prinsip tersebut sangat sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, penguatan rasa persatuan, penerimaan terhadap keberagaman, penyelesaian masalah melalui dialog, serta perlindungan terhadap keadilan sosial. Apabila nilai-nilai ini diterapkan dalam

proses pembelajaran, kegiatan sekolah, dan dibiasakan dalam interaksi sehari-hari, siswa akan berkembang sebagai pribadi yang lebih peduli, mampu memahami perasaan orang lain, dan tidak mudah melakukan tindakan yang merugikan teman sebaya.

Secara menyeluruh, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan moderasi beragama berbasis Pancasila tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi memiliki dampak nyata terhadap perilaku peserta didik. Melalui penguatan nilai toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan penghargaan terhadap keberagaman, sekolah dapat membangun lingkungan yang lebih aman, harmonis, dan kondusif bagi tumbuhnya karakter remaja yang berakhlak, berempati, dan mampu hidup secara damai dengan sesamanya.

Daftar Pustaka

- Afwadzi, B., Rifa'i, A. S., Maskanah, U., Fadillah, T. A., Silky, A., Trianingsih, D., Al-Farabi, M. R. F., Zamzami, M. I., Yunus, M., & Mubarok, M. F. (2025). *Pembentukan Siswa Moderat-Berkarakter dengan Sosialisasi Moderasi Beragama dan Karakter Anti Bullying di MA Mazro'atul Ulum Lamongan*. 4(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/24521/7/24521.pdf>
- Aluf, W. A., Bukhori, I., & Bashith, A. (2024). Evaluasi Pembelajaran Moderasi Beragama untuk Mengukur Penguatan Toleransi Siswa di MIN 2 Pamekasan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1623–1634. <https://repository.uin-malang.ac.id/23823/2/23823.pdf>
- Amirullah, Eko Siswanto, Syaiful Muhyidin, & Athoillah Islamy. (2022). Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 8(1), 197–215. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.272>
- Asnawi, M. H. (2019). *Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa*. 9(1).
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 476–481. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1402>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Moderasi Beragama di Indonesia*, 25(2).
- Fitri, D. (2024). Fenomena Kenakalan Remaja Akibat Aksi Bullying. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 7–10. <https://doi.org/10.57235/sakola.v1i1.2202>
- Hasan, M. (2021). *Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa*. Open Science Framework.
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>
- Junaedi, E. (2019). *Moderasi beragama* (Cetakan pertama). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Lestari, R. D. & Muhammad Saiful Kowi. (2024). Dampak dan Pencegahan Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan Indonesia. *Social Pedagogy:*

- Journal of Social Science Education*, 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i2.9524>
- Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>
- Rohman, A., & Hum, M. (t.t.). *Perjumpaan Muslim dan Tionghoa Menuju Harmoni dan Kerukunan: Perspektif Moderasi Beragama*. <https://repository.uin-malang.ac.id/25856/>
- Tamamiyah, L. (2024). Analisis Dampak Perundungan Terhadap Moral Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(12), 1348–1355. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i12.2616>
- Tang, I., Supraha, W., & Rahman, I. K. (2020). Upaya mengatasinya perilaku perundungan pada usia remaja. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(2), 93–101.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriono, R. A. (2022). *Pancasila Sebagai Dasar Negara*. 4(4).